

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 1 Nomor 2 2019

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Peran Ulama Nahdlatul ‘Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Pemilu Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Pasuruan Perspektif Al-Farabi

NIDA’ MAULIDA

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

nidamaulida353@gmail.com

Abstrak

NU and Muhammadiyah are the largest Islamic organizations in Indonesia that have a political history because of their greater service compared to other parties. Both of these organizations have an important role in the election process for the presidential and vice presidential candidates in 2019, bearing in mind that one of the vice presidential candidates was a cleric who of course had a large number of followers. While among the community, a cleric has quite a dominant influence that is recognized by his leadership by the community, one of them is in Pasuruan Regency which makes a cleric a role model because the cleric is the heir to the prophet. The discussion in this thesis is about the role of the scholars in Pasuruan Regency to mobilize or invite the public in the 2019 presidential and vice presidential election so that they do not abstain and continue to use their voting rights as Indonesian citizens, and how the role of NU and Muhammadiyah scholars in the general election in Pasuruan Regency, in terms of Al-Farabi's Political Thought. This research is qualitative research with empirical descriptive approach method, the method used in data collection is interview as the main method and study of documentation (documentation) to strengthen the data as a reference to strengthen the correctness of observations, the complementary method is the method of data analysis namely descriptive analysis or analysis content (content analysis). The results of this study indicate that the role of the scholars in Pasuruan Regency is very influential on the community, which the scholars or kiai have the authority to guide and direct the community to the right path. According to al-Farabi, humans are social creatures who have a tendency to participate in society because they are not able to meet all their needs without assistance or cooperation with other parties, such as a country where in the course of its policy there are certainly those who help in accordance with their respective duties and authorities.

NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang mempunyai sejarah politik karena jasanya yang lebih besar dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Kedua organisasi ini memiliki peranan penting dalam proses

pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden tahun 2019, mengingat bahwasannya salah satu cawapres itu adalah seorang ulama yang mana tentunya beliau memiliki banyak sekali pengikut. Sedangkan dikalangan masyarakat, seorang ulama memiliki pengaruh yang cukup dominan yang diakui kepemimpinannya oleh masyarakat, salah satunya di Kabupaten Pasuruan yang menjadikan seorang ulama sebagai panutan karena ulama adalah pewaris nabi. Adapun pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana peranan ulama di Kabupaten Pasuruan untuk menggerakkan atau mengajak masyarakat dalam pemilu calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 agar tidak golput dan tetap menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia, serta bagaimana peran ulama NU dan Muhammadiyah dalam pemilihan umum di Kabupaten Pasuruan yang ditinjau dari Pemikiran Politik Al-Farabi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif yuridis empiris, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara sebagai metode utama dan studi kepustakaan (dokumentasi) untuk memperkuat data sebagai acuan memperkuat kebenaran pengamatan, metode pelengkap adalah metode analisis data yaitu analisis deskriptif atau analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran ulama di Kabupaten Pasuruan sangat berpengaruh terhadap masyarakat, yang mana ulama atau kiai itu mempunyai kewenangan untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat ke jalan yang benar. Menurut al-Farabi manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat karena ia tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan atau kerja sama dengan pihak lain, seperti halnya sebuah negara yang mana dalam proses kebijakannya tentu ada yang membantu sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Kata Kunci: Peran Ulama NU dan Muhammadiyah, Pemilu Pilpres, Perspektif Al-Farabi.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, sehingga organisasi-organisasi Islam yang ada semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Salah satunya adalah NU dan Muhammadiyah. Keduanya merupakan Organisasi Masyarakat (ormas) Islam terbesar di dunia khususnya di negara Indonesia, Keduanya jauh lebih tua dan lebih besar jasanya dibandingkan dengan semua partai politik yang ada di Indonesia saat ini.¹ Berbicara terkait dengan pemilihan umum (Pilpres, Pilgub, Walikota atau pemilihan bupati) di Indonesia banyak sekali peran-peran dari warga negara atau dari masyarakat itu sendiri salahsatunya adalah seorang ulama. Karena dalam partisipasi politik tersebut akan menentukan bagaimana nasib pemerintahan dan negara ini untuk kedepannya, tidak hanya dalam pengambilan kebijakan yang sesuai dengan undang-undang tetapi juga sesuai dengan aturan agama Islam.

¹ Muhamad Sobary, 2010, *Nu dan Keindonesiaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal 13.

Dalam kehidupan bernegara, agama tidak hanya berbicara mengenai peradaban muslim dan ritual adat muslim saja, melainkan juga berbicara tentang nilai-nilai agama dan budaya yang harus dikongkretkan dalam kehidupan sosial. Termasuk dalam ranah ketatanegaraan yang kemudian akan muncul suatu tuntutan agar nilai-nilai agama tersebut juga diterapkan dalam kehidupan bernegara khususnya di Indonesia. Dalam organisasi tersebut tentunya dari masing-masing ormas (organisasi masyarakat) memiliki tokoh-tokoh penting di dalamnya yang turut menjalankan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat atau yang biasa disebut dengan para ‘ulama. Secara lughawi ‘ulama adalah orang yang pandai dalam hal ilmu keagamaan terutama agama islam. Nabi pernah bersabda yang artinya:

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

*“Ulama itu pewaris nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham atau dinar, melainkan hanya mewariskan ilmu. Maka barangsiapa mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang cukup banyak”.*²

Dalam stratifikasi sosial, posisi ulama cukup tinggi di Indonesia yakni di kalangan masyarakat, yang mana seorang ulama atau pemimpin agama memiliki pengaruh yang cukup dominan yang diakui kepemimpinannya oleh masyarakat.³ Sehingga masyarakat menganggap bahwasannya ulama tidak hanya sebagai seorang pemimpin informal atau keagamaan, melainkan sebagai pemimpin kemasyarakatan. Di Kabupaten Pasuruan, para tokoh agama (kiyai, ulama) dijadikan sebagai panutan atau pembimbing baik itu dalam konteks spiritual atau keagamaan, adat kebiasaan, pendidikan maupun politik. Mayoritas masyarakat menganggap bahwa apa yang dianut oleh kiai yang mereka percaya adalah suatu hal yang benar yang harus mereka ikuti termasuk dalam pemilihan kepemimpinan suatu negara.

Dalam kontestasi ajang perebutan kekuasaan dalam pemilu pilpres tahun 2019 ini, banyak sekali masyarakat yang ikut serta berperan di dalamnya, seperti tokoh agama maupun seorang kiai. Tokoh agama mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Dengan adanya peran tersebut, mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta dalam berdemokrasi dan berpartisipasi aktif terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, misalnya mengetahui siapa bakal calon yang akan di pilih dan bagaimana cara mereka untuk beraspirasi dalam penyelenggaraan pemilu baik melalui suatu organisasi ataupun melalui partai. Untuk di Kabupaten Pasuruan misalnya, ada beberapa organisasi masyarakat yang memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan pemilu khususnya dalam pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden tahun 2019, yakni organisasi Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah. Keduanya memiliki peran tersendiri dalam mewujudkan atau mensukseskan pemilu tersebut, keberhasilan yang didapat oleh organisasi tersebut juga ditentukan oleh kemampuan mereka dalam memberikan dukungan politiknya maupun himbauan-himbauan dan juga saran mereka dalam mempengaruhi masyarakat.

Hal itu adalah sebuah hubungan langsung antara seorang ulama atau kiai dengan masyarakat sosial yang menganggap bahwa jalan yang ditempuh ulama tersebut harus mereka tempuh juga, artinya apa yang disarankan atau kemana ulama itu mengarahkan pasti berada di jalan yang benar. Dari situlah peran ulama dapat diambil bagaimana cara

² Nur Sayyid Santoso, *Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran Ahlulsunna Wal Jama’ah*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014, hal 197.

³ Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik*, Malang; UIN-Malang Press, 2009, hal 187.

beliau untuk mengajak masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam berdemokrasi. Hal ini sesuai dengan salah satu tokoh pemikiran politik Islam al-Farabi yaitu tentang negara utama (*al-Madinah al-Fadhilah*), dalam negara utama ia mempunyai warga-warga yang memiliki fungsi dan kemampuan yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Ada yang menjadi kepala negara dan ada warga yang memiliki bakat maupun kemampuan yang bertugas untuk kepala negara, demikian halnya kepada kelompok warga yang terakhir yaitu dari kalangan masyarakat.⁴ Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat karena ia tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dengan pihak lain. Adapun tujuan bermasyarakat itu adalah tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, melainkan untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan (tidak hanya material tetapi juga spiritual, tidak hanya di dunia yang fana tetapi juga di akhirat nanti).⁵

Dalam segi kepemimpinan, seorang pemimpin tentu sangat membutuhkan seorang lainnya demi membantu menjalankan kebijakannya di pemerintahan yang mana dari beberapa orang tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda, tujuan dengan adanya hal itu agar proses dalam sistem pemerintahan dapat tertata secara struktural dan akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Begitupun didalam kelompok paling rendah yaitu dikalangan masyarakat yang mana banyak dari mereka yang masih belum mengerti dan memahami mengenai tujuan bernegara itu sendiri, misalnya dalam memilih seorang pemimpin, banyak diantara mereka yang belum mengerti pentingnya berdemokrasi dan bagaimana memilih seorang pemimpin atau kepala negara yang baik sehingga sebagai seorang ulama yang memiliki ilmu agama yang lebih luas mereka memiliki kewajiban untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat ke jalan yang benar serta memberikan pemahaman bahwasannya pengaruh keyakinan agama sebagai seorang Islam selain dalam hal politik dengan moralitas, akhlak atau budi pekerti.

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran seorang ulama di kalangan masyarakat maupun dalam pemilu calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan menurut perspektif al-Farabi.

Metode Penelitian

Jurnal ini menggunakan jenis metode pendekatan deskriptif yuridis empiris atau penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang akan menghasilkan hasil kata-kata dan lisan dari subjek yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu pilpres tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan, serta mengetahui secara aktual terkait dengan peran tokoh agama Islam (ulama) yang berada di wilayah tersebut, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yakni dari ketua PCNU Kabupaten Pasuruan dan juga Pimpinan Ketua Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan dalam memberikan tanggapannya terkait dengan peran ulama terhadap penyelenggaraan

⁴ Muhammad Iqbal dan Amin Husein, 2015, *Pemikiran Politik Islam*, Cetakan ke-3, Jakarta: Prenadamedia Group, hal 11.

⁵ Munawir Sadzali, 1993, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Edisi 5, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal 51.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hal 10.

pemilu calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan sumber data sekunder yang dimuat dalam penelitian ini berupa literatur buku, undang-undang, artikel, jurnal atau tulisan di internet yang terkait dengan penelitian ini, yang sumber referensinya jelas. Adapun untuk bahan penguat dalam sumber data primer, peneliti melakukan penyebaran angket kepada beberapa masyarakat di Kabupaten Pasuruan terkait dengan tanggapan mereka terhadap peran ulama didalam politik maupun pemilu yang dijadikan sebagai panutan.

Adapun dalam teknik pengumpulan data adalah wawancara formal dan informal yang ditujukan kepada beberapa tokoh agama atau ulama dari NU dan Muhammadiyah, yaitu:

1. KH. Imron Mutamakkin (Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan)
2. KH. Sonhaji Abdushomad (Pengasuh Pondok Pesantren Lecari Sukorejo Pasuruan)
3. KH. Mujib Imron (Pengasuh Pondok Pesantren al-Yasini Areng-Areng Pasuruan)
4. Muhammad AFIN (Wakil Ketua sekaligus Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan)
5. Akhmad Munasib Syehad (Pengasuh Yayasan Panti Asuhan Darul Muttaqin di Kraton Kabupaten Pasuruan)

Selain itu, wawancara juga ditujukan kepada masyarakat untuk menanggapi peran ulama di Kabupaten Pasuruan yang kemudian juga dijadikan panutan oleh masyarakat, yaitu:

1. Muhammad Luthfi (ustadz di Pondok Pesantren al-Istiqomah Ngemplak)
2. Sa'dullah Huda (Anggota Partai PKB)
3. Akhmad Fauzan (Kepala Dusun Telbuk Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan)
4. Budianto (Anggota Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan)
5. Mahfud (Anggota Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan)
6. Paidi Fauzi (Anggota Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan)

Hasil dan Pembahasan

Peranan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Pemilu Pilpres di Kabupaten Pasuruan

Di Indonesia, pemilu itu wajib yang mana negara ini adalah negara yang demokratis, jadi menentukan kepala negara itu bukan dilakukan melalui musyawarah melainkan dari pilihan suara rakyat itu sendiri. Akan tetapi banyak dari masyarakat yang masih belum mempunyai kesadaran diri bahwasannya suara mereka itu sangat menentukan negara kedepannya dan banyak yang berpikir bahwa pemilu itu tidak penting atau tidak wajib untuk diikuti sehingga masyarakat lebih memilih untuk golput dibandingkan menggunakan suaranya. Itulah yang disebabkan akibat kurangnya pemahaman mereka terkait dengan politik atau negara, sehingga selain adanya pendidikan formal di lingkungan sekitar maka peranan ulama itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaannya pemilu ini karena dengan itu ulama atau kiai dapat menghimbau masyarakat dan memberikan arahan-arahan kepada masyarakat untuk ikut berdemokrasi. Adapun ulama-ulama di Kabupaten Pasuruan memiliki argument yang berbeda-beda terkait dengan peranannya didalam pemilu pilpres ini.

Menurut beberapa ulama dari NU terkait dengan adanya penyelenggaraan pemilu pada tahun 2019 ini khususnya di Kabupaten Pasuruan bahwasannya pemilu tahun 2019

sangat berbeda dengan pemilu-pemilu yang sebelumnya yang mana pemilu ini sangat mencolok sekali perdebatannya, yang mana hal itu disebabkan karena banyaknya berita buruk yang tersebar di media sosial sehingga masyarakat berasumsi sendiri mengenai adanya berita itu yang kemudian tidak dicari sumbernya karena berita yang disebarkan belum tentu berita yang benar. Mengingat media sosial saat ini sangat canggih dan sudah marak di kalangan manapun yang memungkinkan para masyarakat mudah dengan cepat mendapatkan berita yang kurang benar. Dengan hal itu para ulama memiliki hak atau kewajiban sebagai seseorang yang lebih paham agama dan mengaitkan agama dengan negara yaitu mereka menengahi dan membenahi hal tersebut yang kemudian mereka mengarahkan masyarakat untuk mengharuskan memilih seorang presiden terlepas dari siapa yang akan dipilih karena memilih seorang pemimpin atau yang kita sebut sebagai presiden itu adalah wajib hukumnya baik itu menurut agama maupun undang-undang yang ada.

Sedangkan menurut beberapa ulama dari Muhammadiyah terkait dengan adanya penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan turut di apresiasi karena dengan banyaknya kendala-kendala yang telah dilampaui oleh kedua paslon ini tidak menghambat proses berjalannya demokrasi, serta tidak menjadikan pemilu pilpres ini terhalangi dan tetap terlaksana dengan tertib, terutama di Pasuruan sendiri. Adapun peranannya sebagai seorang ulama, menurut mereka kewajiban seorang ulama adalah mensejahterahkan umat muslim bukan terikat dengan politik, karena seorang ulama adalah panutan bagi masyarakat baik dalam hal perilakunya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga akan lebih baik jika seorang ulama itu tidak terlibat dalam politik apapun untuk menghindari pemikiran-pemikiran negatif di masyarakat.

Kedua pemahaman ini yakni dari ulama NU dan Muhammadiyah adalah suatu hal yang lumrah karena seseorang mempunyai pandangan sendiri-sendiri untuk menilai sesuatu hal. Akan tetapi dalam keterlibatan seorang ulama atau seorang lainnya didalam politik maupun pemilu itu adalah hak setiap orang yang tidak bisa dipaksakan terutama kepada seseorang yang memang mampu dan paham terkait dengan ketatanegaraan.

Di Kabupaten Pasuruan banyak para kiai yang ikut dalam politik, terutama para kiai yang memiliki pondok-pondok besar yang mana mereka lebih mudah untuk menggerakkan masyarakatnya, warga sekitar maupun santri-santrinya melalui ceramah, pengajian atau perkumpulan bersama ustadz dan yang lainnya agar tidak meninggalkan kewajibannya sebagai bangsa Indonesia yakni harus mengikuti pemilu yang telah diadakan karena masyarakat menganggap bahwa seorang kiai itu adalah seorang panutan dalam segala hal.

Mengenai seorang ulama di Kabupaten Pasuruan yang memang layak dijadikan sebagai seorang panutan bagi masyarakat dan sebagai seseorang yang memiliki kewibawaan dalam segi agama salah satunya yang menjadi suri tauladan dan contoh yang baik untuk masyarakat, maka seorang ulama itu patut dijadikan sebagai panutan yang baik yang mana dalam pendakwahnya sudah sesuai dengan ajaran-ajaran islam dan dalam pendakwahnya itu sudah terkait dengan amal ma'ruf nahi munkar yang segala sesuatunya sudah sesuai dengan perintah Allah SWT sehingga masyarakat sudah mempercayai seorang ulama atau kiai untuk menjadikannya sebagai panutan dalam kehidupannya.

Peran Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Pemilu Pilpres ditinjau Dari Pemikiran Al-Farabi.

Berdasarkan dari paparan di atas dapat kita pahami terkait dengan peran ulama dari NU dan Muhammadiyah dalam pemilu adalah sangat berpengaruh yang mana ulama di Kabupaten Pasuruan dianggap sebagai panutan dalam segala bentuk perilaku, perkataan, moral, adab maupun politik. Walaupun ada sedikit perbedaan pendapat dari kedua organisasi ini terkait dengan adanya peranan ulama didalam politik tetapi dari NU maupun Muhammadiyahnya itu sendiri tidak ada keterlibatan langsung terhadap penyelenggaraan politik dan pemilu yang ada, selain itu keduanya ini juga lebih memilih untuk netral dalam menyikapi hal-hal tersebut.

Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan seperti halnya masyarakat yang kurang pengetahuannya kemudian sebagai seorang ulama dia wajib memberikan ilmunya kepada manusia lainnya, selain itu dalam segi kepemimpinan seorang pemimpin tentunya sangat membutuhkan seorang lainnya demi membantu menjalankan kebijakannya di pemerintahan yang mana dari beberapa orang yang terikat dengan hal itu tentu memiliki tugas dan wewenangnya sendiri untuk mencapai tujuan negara yang dipimpin oleh kepala negara. Hal ini terkait dengan pendapat al-Farabi yang mana tujuan bermasyarakat itu tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak hanya material tetapi juga spiritual, tidak hanya di dunia yang fana ini tetapi juga di akhirat nanti.

Pendapat Farabi tentang tujuan hidup bermasyarakat atau bernegara itu memperlihatkan pengaruh keyakinan agamanya sebagai seorang islam selain dalam hal politik dengan moralitas, akhlak atau budi pekerti. Manusia adalah bukan tujuan utama dari adanya bermasyarakat akan tetapi manusia di kelompokkan sebagai sebuah perantara untuk mencapai tujuan utama yaitu suatu bentuk yang dapat membawa manusia itu dalam kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Maka dari itu dari teori ini dapat dipahami bahwa ada keterkaitan antara masyarakat, negara dan pemimpin, mengingat di Indonesia ini adalah negara yang demokratis yang mana setiap warga negara berhak berpendapat termasuk dalam memberikan hak suaranya dalam memilih sebuah pemimpin untuk negaranya.

Peranan ulama dalam pemilu di Kabupaten Pasuruan adalah mengarahkan masyarakat dalam segala hal termasuk juga dalam perbuatannya karena suatu perbuatan itu tidak bisa lepas dari agama dan dalam menentukan pilihan kepala negara, hal ini sesuai dengan yang dimaksud al-Farabi tentang tujuan hidup bermasyarakat atau bernegara yang memperlihatkan pengaruh keyakinan agamanya sebagai seorang Islam selain dalam hal politik dengan moralitas, akhlak atau budi pekerti. seorang ulama mempunyai peran untuk mengarahkan dan membimbing masyarakat untuk tetap ikut serta dalam menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Berdasarkan konsep al-farabi terkait dengan peranan ulama di Kabupaten Pasuruan yang mana seorang ulama ini mempunyai wewenang untuk membimbing masyarakat ke jalan yang benar tidak hanya dalam segi kehidupan sehari-hari tetapi juga dalam segi kepemimpinan atau politiknya, karena menurut al-Farabi manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat karena ia tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dengan pihak lain, begitupun dengan negara atau pemerintahan yang mana dalam proses kebijakannya tentu ada yang membantu sesuai dengan tugas dan wewenang atau fungsinya sendiri-sendiri. seperti halnya masyarakat, ulama memiliki peran didalamnya karena ulama mempunyai pemahaman agama yang lebih luas sehingga dapat mengamalkan ilmunya dengan baik kepada masyarakat sekitar.

Jadi manusia atau masyarakat sangat berpengaruh terhadap terpilihnya pemimpin negara demi mencapai tujuan bersama yaitu kebahagiaan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran negara itu sendiri. Seseorang tidak akan menjadi pemimpin suatu negara apabila dia tidak di percaya oleh masyarakatnya memegang kekuasaan, itulah hak yang dimiliki oleh masyarakat yang juga sama-sama ingin memajukan bangsa Indonesia. Masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik dan pemimpin harus amanah dalam mengemban tugasnya untuk mewujudkan negara ini menjadi negara yang lebih maju dan selalu menyejahterahkan rakyatnya.

Keterkaitan masyarakat, negara dan pemimpin sangat mencolok di Indonesia khususnya di Kabupaten Pasuruan yang mana dalam peranan ulama yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat tidak disebabkan karena arahan yang mereka berikan akan tetapi karena masyarakat di Pasuruan sudah menganggap seorang ulama itu adalah sebagai panutan, yang sudah dipercayai dalam segala sesuatunya yaitu tutur kata, tingkah laku, ilmu keagamaannya dan juga pendapat politiknya. Masyarakat mempercayai itu karena apa yang telah diberikan oleh para ulama atau kiai itu memang sesuai dengan ajaran dan ketentuan Allah SWT yang tidak menyimpang dari ajaran-Nya. Hal itu sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yaitu :

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

“Ulama adalah pewaris para nabi” (H.R At-Tirmidzi dari Abu Ad-Darda ra).

Jadi ulama itu tidak hanya seseorang yang dijadikan panutan saja melainkan ulama adalah seseorang yang mewarisi ilmu dari para nabi, tidak hanya dalam aspek beribadah tetapi juga dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hal berpolitik dan kepemimpinan. Agar dalam memimpin sebuah daerah atau negara bisa tertata dengan baik sesuai dengan amalan atau yang pernah diajarkan oleh para nabi karena pada dasarnya segala sesuatu yang diajarkan dan diberikan oleh nabi adalah sesuatu hal yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist. Begitupun dengan seorang ulama yang telah ciptakan sebagai penerus dari para nabi terdahulu untuk mengaplikasikan dan memberikan ilmu-ilmunya kepada sesama umat manusia agar mereka semua tidak tersesat dan berada di jalan yang benar seperti yang ada dalam Al-Qur’an dan hadist. Dari situlah kemudian masyarakat dapat mengerti pentingnya sebuah negara dan memilih pemimpin yang baik, jujur dan bijaksana dan tidak hanya mengerti dibidang politik saja tetapi juga dibidang agama sehingga masyarakat tidak akan salah dalam memilih pemimpinnya. Walaupun hanya memilih tetapi itu adalah sebuah kontribusi yang penting dari masyarakat dalam pemilihan pemimpin, untuk menjadikan seorang pemimpin yang baik untuk negara demi kemakmuran warga negaranya sehingga bisa menuju kebahagiaan di dunia yaitu kesejahteraan rakyat dan negara kemudian bisa menuju kebahagiaan di akhirat karena mempertahankan atau memajukan bangsa ini merupakan ijtihad di jalan yang benar.

Tabel 4.1

Kesimpulan Hasil Penelitian dan Pembahasan Peran Ulama NU dan Muhammadiyah Dalam Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan

	Nahdlatul ‘ulama	Muhammadiyah	Saran
--	------------------	--------------	-------

<p>Peran Ulama di Kabupaten Pasuruan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan masyarakat ke jalan yang benar 2. Mengayomi masyarakat 3. Membimbing umat 4. Memberikan pemahaman, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal politik 5. Mengatur rakyat supaya masalah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan untuk tetap jujur dan adil). 2. Mengatur kesejahteraan masyarakat. 	<p>Seorang ulama diharapkan agar lebih memperhatikan tugasnya untuk mengarahkan masyarakat dalam berdemokrasi, tidak hanya kepada masyarakat kota saja melainkan juga dari kalangan masyarakat pesisir-pesisir yang masih belum memahami terkait dengan demokrasi maupun pemilihan umum.</p>
<p>Konsep Al-Farabi</p>	<p>Negara Utama (<i>Al-Madinah Al-Fadhilah</i>)</p>	<p>Ia mempunyai warga-warga dengan fungsi dan kemampuan yang tidak sama satu dengan lainnya. Kebahagiaan bagi satu masyarakat tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali ada pembagian kerja yang berbeda, sesuai dengan kemampuan anggota masing-masing yang dijiwai oleh rasa setia kawan dan kerja sama yang baik.</p>	

Kesimpulan

Peran ulama di Kabupaten Pasuruan sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang mana ulama atau kiai mempunyai kewenangan untuk mengawal masyarakat untuk mempunyai pengetahuan agama, mengamalkan agama dengan baik. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan ketatanegaraan maupun ilmu politiknya, serta menghimbau masyarakat agar dapat memberikan kesadaran untuk tidak golput dan

juga mengingatkan masyarakat bahwa memilih seorang pemimpin itu wajib demi Indonesia kedepannya. Peran ulama dalam masyarakat sangat dibutuhkan karena ulama merupakan pewaris nabi yang memiliki ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dan mendalam sehingga dapat mengayomi semua masyarakat untuk mengarahkan kepada aturan-aturan yang sesuai dengan agama dan Undang-Undang. Berdasarkan konsep al-farabi terkait dengan peranan ulama di Kabupaten Pasuruan yang mana seorang ulama ini mempunyai wewenang untuk membimbing masyarakat ke jalan yang benar tidak hanya dalam segi kehidupan sehari-hari tetapi juga dalam segi kepemimpinan atau politiknya, karena menurut al-Farabi manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat karena ia tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dengan pihak lain, begitupun dengan negara atau pemerintahan yang mana dalam proses kebijakannya tentu ada yang membantu sesuai dengan tugas dan wewenang atau fungsinya sendiri-sendiri. seperti halnya masyarakat, ulama memiliki peran didalamnya karena ulama mempunyai pemahaman agama yang lebih luas sehingga dapat mengamalkan ilmunya dengan baik kepada masyarakat sekitar.

Daftar Pustaka

- Husein Amin dan Iqbal Muhammad, 2015, *Pemikiran Politik Islam*, Cetakan ke-3, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sadzali Munawir, 1993, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Edisi 5, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Santoso Nur Sayyid, 2014, *Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran Ahlussunnah Wal Jama'ah*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Sobary Muhammad, 2010, *Nu dan Keindonesiaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982).
- Suprayogo Imam, *Kyai dan Politik*, Malang; UIN-Malang Press, 2009.